

332. b  
D12  
2 u.

**ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN EKSTENSIFIKASI PRAKTEK  
SOCIAL DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN EMITEN  
DI BURSA EFEK JAKARTA  
BERDASARKAN TIPE INDUSTRI DAN UKURAN PERUSAHAAN**

**T E S I S**

*Diajukan sebagai salah satu syarat  
memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi*



**Diajukan Oleh :**

**N a m a : Novi Dirgantari**

**NIM : C4C099423**

**KEPADA  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2002**

**UPT-PUSTAK-INDIP**

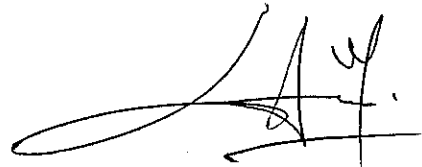
## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

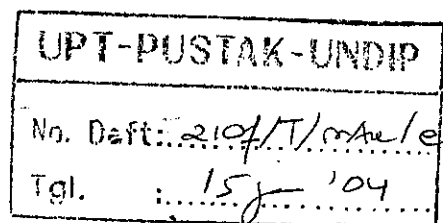
Nama : Novi Dirgantari  
NIM. : C4C099423  
Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat dengan judul "Analisis Terhadap Perbedaan Ekstensifikasi Praktek *Social Disclosure* Pada Perusahaan-Perusahaan Emiten di Bursa Efek Jakarta Berdasarkan Tipe Industri dan Ukuran Perusahaan" yang diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh derajat S-2 Magister Sains Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tahun 2002 adalah benar-benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan pada program studi yang sama di universitas manapun. Bila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar yang sudah saya peroleh.

Semarang, Oktober 2002



Novi Dirgantari



Tesis Berjudul

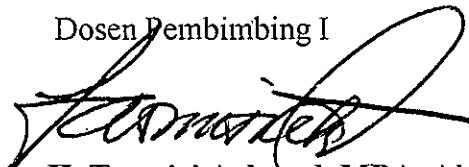
**ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN EKSTENSIFIKASI PRAKTEK  
SOCIAL DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN EMITEN  
DI BURSA EFEK JAKARTA  
BERDASARKAN TIPE INDUSTRI DAN UKURAN PERUSAHAAN**

Yang disiapkan dan disusun oleh  
**Novi Dirgantari**

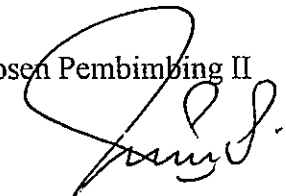
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Oktober 2002  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Tim Penguji

Dosen Pembimbing I

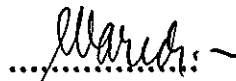
  
**Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Akt**

Dosen Pembimbing II

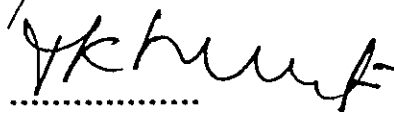
  
**Dra. Zulaikha, MSi, Akt**

Anggota Tim Penguji

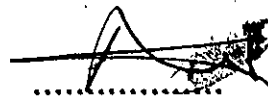
1. **DR. Waridin, MS**

  
.....

2. **Drs. Muhammad Kholiq, MSi, Akt**

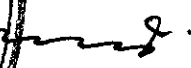
  
.....

3. **Drs. Raharja, MSi, Akt**

  
.....

Semarang,  
Universitas Diponegoro  
Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Akuntansi



  
**Drs. Muhammad Nasir, MSi, Akt**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini mencoba membandingkan perbedaan tingkat keluasan praktek *social disclosure* pada tipe industri, sektor industri dan ukuran perusahaan yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari riset Muslim (1998), dengan menambahkan variabel ukuran perusahaan dan sektor industri dalam pengujiannya. Data yang digunakan diperoleh melalui metode sampling *proportioned stratified random sampling* yang didasarkan pada stratifikasi industri yang berlaku di Bursa Efek Jakarta tahun 2001. Metode analisa statistik yang digunakan untuk menguji empat hipotesa adalah *T-test* dan *Anova*. Distribusi probabilitas dari data yang tersaji adalah distribusi normal, berdasarkan pengujian normalitas data Kolmogorov – Smirnov dan Shaphiro- Wilk. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur keluasan praktek *social disclosure* adalah *social disclosure check list* yang dikeluarkan oleh Ernst & Ernst 1978. Kemudian untuk mengukur ukuran perusahaan didasarkan pada jumlah total aset sesuai dengan kriteria SK Menteri Perindustrian No. 13/M/SK-I/3?1990. Pengukuran tipe industri didasarkan pada tingkat sensitivitasnya terhadap kerusakan lingkungan, *consumer visibility* dan *political visibility*. Yaitu perusahaan high profile terdiri dari perusahaan industri pertanian, pertambangan, kimia, kehutanan, otomotif, pulp dan kertas, tembakau dan industri rokok, makanan dan minuman, infrastruktur, komunikasi dan gas dan minyak. Sementara perusahaan low profile terdiri dari ritail, keuangan, real estate dan properti, tekstil, produk rumah tanggadan pelayanan kesehatan. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70 perusahaan emiten di Bursa Efek Jakarta yang listing pada tahun 2001 dan mengeluarkan laporan tahunan 2001. Perusahaan sampel yang ada terstratifikasi dalam 9 kelompok sektor industri dan terbagi lagi dalam 42 blok. Terdiri dari 41 perusahaan high profile dan 29 perusahaan low profile, 54 perusahaan besar, 11 perusahaan berskala menengah dan 5 perusahaan berskala kecil.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan high profile lebih luas dibandingkan perusahaan low profile; (2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan besar dan perusahaan menengah, dan antara perusahaan menengah dan kecil; (3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan bersektor industri primer dengan perusahaan bersektor industri sekunder dan tersier; (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan bersektor industri primer dengan perusahaan bersektor industri sekunder.

## ABSTRACT

Study to investigated the difference of social disclosure extent to the different industry type, different industry sector and different company size. This study is replicated from Muslim's research (1998), but to added by company size and industry sector variable. Data which is used in this research collected through proportioned stratified random sampling which is based on the industry stratification on Jakarta Stock Exchange in 2001. Then according to the purposes of this research, the statistic method which is used to test the four hypotheses are T- test and Anova (Analysis of Varians). The probability distribution of the data is normal. Normality test which is used is Kolmogorov –Smirnov and Shaphiro – Wilk. Instrument which used by this research for social disclosure measurement is social disclosure check list which issued by Ernst and Ernst 1978. Then for companies size measurement is based on the total asset according to the SK Menteri Perindustrian No. 13/M/SK-I/3/1990. While the industry type measurement is based on its sensitivity level of industry to the environment damage, consumer visibility and political visibility. High profile companies consisted of agricultural, chemical, forestry, automotive, pulp and paper, tobacco, food and beverages, infrastructure, communication, and mining, gas and oil industry. While low profile companies consisted of retail, finance, real estate and property, textile, wholesale, and health care. The sample size which is used are 70 listing companies on Jakarta Stock Exchange in 2001, they issued annual report 2001. Companies sample is stratified by 9 groups of industry sector and 42 blocks. They consist of 41 high profile companies and 29 low profile companies, and 54 big companies, 11 medium companies and 5 small companies.

The study results are as follows : (1) Social disclosure which is applied by high profile companies are more extent than low profile companies. It is showed by the value of probability which is lower than level of significant;  $0,000 < 0,05$ . (2) There were not significant difference between social disclosure which is applied by big companies and medium companies, and between medium companies and small companies. It is showed by probability value which higher than significant level, 0,061 and 0,335. But there were significant difference between social disclosure which applied by big companies and small companies. It is showed by probability value of Tukey HSD and Bonferroni which is lower than significant level 0,05, that is 0,006; (3) While there were significant difference between social disclosure which is applied by companies of primary sector industry and secondary sector industry and tertiary industry. It is showed by probability value 0,031, which is lower than significant level 0,05; (4) There were not significant difference between social disclosure which is applied by companies in primary sector industry and secondary industry.

Keywords : Social disclosure, industry type, company size, industry sector.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul Analisis Terhadap Praktek *Social Disclosure* pada Perusahaan Emiten Bursa Efek Jakarta Berdasarkan Tipe Industri dan Ukuran Perusahaan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris adanya penerapan praktek *social disclosure* yang lebih banyak dilakukan oleh perusahaan dalam industri *high profile* dan berukuran besar.

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini sejak penulisan proposal usulan penelitian sampai dengan penyusunan tesis ini :

1. Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Akt selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.
2. Dra. Zulaikha, MSi, Akt selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan tesis.
3. Segenap Pengelola Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Akuntansi.
4. Suamiku Sugeng Wahyudi, SPt atas dorongan moral dan material serta doa restunya, dan putriku Jauza Firdhausy Haura Hasna, yang senantiasa memberi semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Ir. H., Purwito, MS di rumah, atas bantuan moral dan material serta doa restunya.
6. Keluarga Bapak dan Ibu Sugiono, Ning dan Nur di Kebumen atas doa restunya.
7. Mas Arief Wisnu Wardhana, B.Eng, (Hons) di Cilegon, atas bantuan materinya selama penulis menempuh studi di Semarang, dan Nancy Shinta Dewi, SE, Ak dan Lettu. Inf. Budhi Utomo di Palembang, atas doa restunya.

8. Special Thanks to my sister Negin Kencono Putri, S.E, Ak di Jogja yang telah banyak membantu penulis selama penelitian dan atas kritik dan sarannya terhadap penulisan tesis ini.
9. Keluarga Ir. Nita Kartika, MSc dan Drs .Budi Prasetyo di Jakarta, yang telah banyak memberi informasi beasiswa BPPS.
10. DR. H. Joko Wahyono, SU, Apt, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang telah memberi ijin penulis untuk melanjutkan studi S2.
11. Segenap rekan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang memerlukan.

Semarang, Oktober 2002

Penulis

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Lampiran .....	vii
 I. PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
 II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....	 13
2.1 Telaah Pustaka .....	13
2.2 Penelitian Terdahulu .....	22
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	25
2.4 Perumusan Hipotesis .....	27
 III. METODE PENELITIAN .....	 28
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	30
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	31
3.5 Teknik Analisis .....	34
 IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	 38
4.1 Gambaran Umum Perusahaan Sampel .....	38
4.2 Profil Perusahaan Sampel .....	39
4.3 Uji Normalitas Data .....	43
4.4 Uji Hipotesis .....	45
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	47
4.6 Keterbatasan Penelitian .....	51



V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN .....	57

## DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
1. Model Penelitian Perbedaan Ekstensifikasi Praktek <i>Social Disclosure</i> pada Perusahaan Bertipe Industri High Profile Dan <i>Low Profile</i> serta pada Perusahaan Berskala Besar dan Menengah & Kecil .....	26

## DAFTAR TABEL

<u>Tabel.</u>	<u>Halaman</u>
1. Tabel Perbandingan Penelitian Sejenis tentang Praktek <i>Social Disclosure</i> .....	25
2. Proporsi Perusahaan Sampel Penelitian .....	30
3. Komposisi Perusahaan Sampel yang <i>Listed</i> dan Melakukan Praktek <i>Social Disclosure</i> dalam <i>Annual Report</i> di BEJ Tahun 2001 .....	40
4. Komposisi Perusahaan-Perusahaan Sampel Berdasarkan Ukuran Perusahaan .....	41
5. Komposisi Tingkat Keluasan Praktek <i>Social Disclosure</i> Perusahaan-Perusahaan Sampel Berdasarkan Tipe Industri .....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran.</u>	<u>Halaman</u>
1. Daftar Item <i>Social Disclosure</i> dalam Laporan Tahunan Perusahaan Kategori <i>Social Disclosure</i> .....	57
2. <i>Social Disclosure</i> Perusahaan-Perusahaan yang <i>Listed</i> di Bursa Efek Jakarta tahun 2001 .....	58
3. Output Olahan SPSS .....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan semakin tingginya perhatian publik terhadap masalah lingkungan dan sosial, sejumlah perusahaan saat ini semakin bersikap responsif terhadap permintaan sejumlah kalangan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja lingkungan sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate environmental and social responsibility*).

Salah satu contoh kasus adalah permintaan dari SEC (*Stock Exchange Comm itte*) sebagai Badan Pengawas Penanaman Modal kepada sejumlah perusahaan di Amerika Serikat yang *go public* sejak tahun 1995 (Beets & Sherther, 1999) untuk menyajikan pelaporan/*disclosure* terhadap kinerja lingkungan dan sosial yang dimilikinya sebagai syarat penjualan sahamnya kepada masyarakat. Hal serupa dilakukan pula oleh EPA (*Environment Program of Accounting*) pada tahun 1998, dengan mengeluarkan peraturan yang ditujukan kepada perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam lima jenis industri yang beresiko melakukan pencemaran lingkungan dan sosial yang tinggi (minyak, baja, metal, automobile, dan kertas). Isi peraturan tersebut adalah adanya kewajiban bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyajikan laporan kinerja lingkungan dan sosialnya selama dua tahun berturut - turut dalam website EPA, yaitu *www. epa.gov/enviro/*.

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

Sejumlah perusahaan telah mencoba untuk melakukannya dalam bentuk *disclosure* yang diterbitkan dalam laporan lingkungan periodik yang dikeluarkan baik dalam laporan keuangan tahunan ataupun dipisahkan dari laporan keuangan tahunan. Pelaporan tersebut terlihat berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Lebih dari duapuluh tahun atau lebih investigasi empiris terhadap praktek *social disclosure* telah menghasilkan begitu banyak penelitian yang berkaitan dengan perspektif teoritis yang berbeda-beda, baik secara eksplisit atau implisit (Arnold, 1990; Tinker *et.al.*, 1991 dalam Gray *et.al.*, 1995). Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda-beda; yang dimotivasi oleh berbagai pertanyaan riset; dan mencakup negara dan periode waktu yang berbeda. Kendati demikian, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentatif terhadap praktek *social disclosure* yang ada (Gray *et.al.*, 1995).

Pertama, praktek *social disclosure* tidak akan muncul sebagai aktivitas yang sistematis sepanjang standar yang diperlukan tidak ada. Hal tersebut telah banyak dijelaskan oleh Beets & Serther, (1999), dimana adanya standar terhadap praktek *social disclosure* akan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Adanya standar yang diberlakukan terhadap praktek *corporate social reporting*, menjadikan *social disclosure* sebagai suatu *mandatory disclosure*, sehingga *corporate social reporting* menjadi lebih akurat dan komplit; laporan antar perusahaan dengan perusahaan, industri dengan industri dapat lebih diperbandingkan (*comparable*) dan konsisten serta dapat

menghindarkan dari perbedaan pola praktek *social disclosure*. Disamping itu, menurut Aeppel *et.al.*, (1993), standar akan menghindarkan praktek *corporate social reporting* sekedar sebagai bagian dari proyek “*public relation*” perusahaan, yang mencoba mempropagandakan kinerja lingkungan sosial perusahaan.

Kedua, praktek *social disclosure* tidak selalu dapat dihubungkan dengan masalah profitabilitas (Monsen dan Abbott, 1979; Belkaoui dan Karpik, 1989; Cowen *et.al.*, 1987; Freedman dan Jaggi, 1988; Freedman dan Ullmann, 1986; Ingram, 1978; Singh dan Ahuja, 1983, dalam Gray *et.al.*, 1995a), meskipun terdapat beberapa bukti menunjukkan bahwa praktek *social disclosure* berkaitan dengan masalah profitabilitas (Roberts, 1992). Adanya hubungan yang bersifat negatif antara praktek *social disclosure* dengan kinerja keuangan yang baik didukung oleh hasil penelitian dari Alexander dan Buckholz, 1982; Aupperle, Carroll dan Hafield, 1985 dan Aupperle, Carroll, Shane dan Spicer, 1983 dalam Gray *et.al.*, 1995a). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya *ambiguous relationship* antara keduanya.

Ketiga, perbedaan pola praktek *social disclosure* antar perusahaan berkaitan erat dengan masalah besar kecilnya perusahaan (*company size*). Namun demikian tidak memiliki keterkaitan secara langsung (Andrews *et.al.*, 1989; Belkaoui dan Karpik; 1989; Cowen *et.al.*, 1987; Singh dan Ahuja, 1983; Tonkin dan Skerratt, 1991; Trotman dan Bradley, 1981 dalam Gray *et.al.*, 1995a).

Keempat, terdapat bukti adanya hubungan antara tipe industri dengan perbedaan pola praktek *social disclosure*. Hubungan antara tipe industri dengan perbedaan pola praktek *social disclosure* tersebut diduga berkaitan erat dengan masalah lokasi untuk industri – industri tertentu, orientasi konsumen dari industri, *capital goods* atau barang modal yang digunakan dalam masing – masing industri, *public visibility* dan tingkat campur tangan pemerintah, struktur persaingan dalam industri, serta historis yang menentukan budaya dalam industri ( Jones, 1999).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hackston & Milne (1996), Adams *et. al.*, (1997), Andrew *et.al.* (1989), Patten (1991), Diekers & Preston (1997), Robert, (1992) (dalam Muslim, 1998), didapatkan bukti bahwa pada perusahaan yang mempunyai sifat industri *high profile* yang dicirikan dengan adanya pengaruh *consumer visibility*, campur tangan pemerintah atau resiko politik dan tingkat kompetisi yang sedemikian tinggi dan ketat, ditemukan praktek *social disclosure* yang berkembang lebih ekstensif dibandingkan dengan perusahaan yang bertipe *low profile*, yang dicirikan dengan rendahnya pengaruh *consumer visibility* dan *political visibility*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang bertipe demikian dalam melakukan aktivitasnya banyak memodifikasi lingkungan dan menimbulkan dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat sekitar dan *stakeholders*-nya, misalnya pada industri ekstraktif (Diekers dan Preston dalam Hackston & Milne, 1996). Dengan kondisi yang demikian, perusahaan yang bertipe industri *high profile* menjadi sangat rentan terhadap perhatian publik, banyak kepentingan dari para *stakeholders* yang



harus diakomodasikan (Jones, 1999). Praktek *social disclosure* menjadi bukti bahwa perusahaan telah mendengarkan aspirasi/ mengakomodasikan kepentingan *stakeholders*. Selain itu, menurut Cowen *et.al.*, (1987) dalam Hackston & Milne, 1996, dengan melakukan praktek *social disclosure* yang lebih luas, perusahaan bertipe *high profile* akan lebih dapat menunjukkan tanggungjawab sosialnya terhadap komunitasnya, sehingga diharapkan dapat menjaga *image* perusahaan yang pada akhirnya dapat memberi pengaruh positif terhadap tingkat penjualannya.

Demikian pula pada perusahaan yang berskala besar, praktek *social disclosure* akan lebih ekstensif diterapkan. Watts & Zimmerman, 1986; Deegan & Carroll, 1993 dalam Theo, *et.al.*, 1997, mengungkapkan bahwa perusahaan besar akan selalu memiliki *political visibility* atau *political costs* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga mereka merasa perlu melakukan praktek *social disclosure* lebih ekstensif dengan tujuan untuk mengurangi biaya politis (Deegan & Gordon, 1994) atau *political visibility* (Belkaoui & Karpik, 1989). Disamping itu, perusahaan besar lebih rentan terhadap perhatian publik, pemerintah, dan kelompok pemerhati lingkungan dan sosial, atau lebih mendapatkan tekanan politik dari publik.

Guna menghindari klaim, maka pihak manajemen perusahaan berusaha mengembangkan kebijakan dan strategi yang berwawasan lingkungan dan sosial dengan melaporkan kinerja lingkungan dan sosialnya dalam laporan tahunannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada publik, bahwa aktivitas mereka telah selaras dengan lingkungan, sehingga dengan

demikian stabilitas perusahaan akan senantiasa terjaga (Elkington, 1994; Greeno & Robinson, 1992 dalam Theo, *et.al.*, 1997). Strategi tersebut dijalankan oleh perusahaan besar dengan tujuan akhir untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholders*-nya. Dengan adanya legitimasi, maka perusahaan dapat terhindar dari tuntutan ganti rugi biaya pencemaran lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas operasi perusahaan. Selain itu, pada perusahaan besar biasanya memiliki aktivitas lingkungan yang lebih baik, hal ini diduga karena adanya modal besar yang mereka miliki sehingga lebih mampu menyusun kebijakan dan strategi yang berwawasan lingkungan dan sosial (Spicer, 1978; Chen & Metcalf, 1980 dalam Theo *et.al.*, 1997). Pruzan (1998) dan Zadek (1998), menambahkan bahwa perusahaan besar dengan intensitas modal yang besar perlu memiliki ukuran pengawasan yang mendetail dan ketat. Ukuran tersebut tidak cukup dengan ukuran perspektif keuangan saja, namun harus dengan ukuran perspektif yang lain, salah satunya lingkungan sosial, guna lebih mendayagunakan modal yang ada. Dengan demikian, praktek *social disclosure* yang ekstensif menjadi pilihan yang dianggap tepat bagi perusahaan besar untuk menjelaskan kinerja lingkungan dan sosialnya.

Penelitian mengenai perbedaan pola praktek *social disclosure* berdasarkan tipe industri di Indonesia, telah dilakukan oleh Muslim, 1998, dengan mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1998 dan mendasarkan pembagian tipe industri menjadi *high profile* dan *low profile* yang didasarkan pada tingkat sensitivitasnya terhadap lingkungan. Disamping

itu, perusahaan manufaktur dikeluarkan dari sampelnya dan menggunakan instrumen pengukur *social disclosure* berupa suatu daftar yang diciptakan sendiri yang sifatnya subyektif.

Berdasarkan penelitian Jones, 1999, pembagian tipe industri *high profile* dan *low profile* berbeda-beda sesuai dengan masing-masing sektor industri. Untuk sektor primer, dimana pada umumnya bersifat ekstraktif, tuntutan pertanggungjawaban sosialnya yang berkaitan dengan lingkungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industri pada sektor sekunder dan tersier. Hal tersebut membawa konsekuensi pada pola *social disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan dalam sektor tersebut, dimana pada umumnya lebih ekstensif dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor industri sekunder maupun tersier. Kemudian pada sektor industri tersier, dimana persentuhannya dengan masalah kerusakan lingkungan cukup rendah, pola *social disclosure* yang diterapkan lebih kurang ekstensif dibandingkan dengan industri sekunder, yang meskipun tidak banyak bersentuhan dengan masalah kerusakan lingkungan, namun justru memiliki *stakeholders* yang paling kompleks. Sehingga pertanggungjawaban sosial yang diwujudkan dalam bentuk *social disclosure* juga sama ekstensifnya dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor primer.

Menurut Jones pula, perusahaan manufaktur yang mengolah *raw material* menjadi barang setengah jadi melalui proses pabrikasi adalah yang paling luas cakupan *stakeholders*nya sehingga dapat dianggap sebagai perusahaan yang bertipe *high profile*. Maka dalam penelitian ini

perusahaan yang tergolong dalam industri manufaktur justru diambil sebagai sampel. Alasan lain yang menjadi dasar pengambilan perusahaan yang tergolong dalam industri manufaktur menjadi sampel penelitian ini, adalah bahwa praktek *social disclosure* tidak hanya mengungkap kinerja perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan atau *natural resources*, namun juga mengungkap kinerja perusahaan yang mempunyai dampak terhadap *stakeholdersnya* (Gray *et.al.*, 1995a; Carol, 1994).

Disamping itu, penelitian ini juga mencoba untuk menambah variabel yang belum teruji dalam penelitian yang dilakukan oleh Muslim, yaitu variabel ukuran perusahaan. Sesuai dengan penelitian terdahulu dari Trotman & Bradley, 1981; Cowen *et.al.*, 1987 dan Chen & Metcalf, 1980 (dalam Theo, *et.al.*, 1997) serta penelitian Hackston & Milne (1996), bahwa praktek *social disclosure* disamping ditentukan oleh tipe industri, juga ditentukan oleh ukuran perusahaan. Bagaimanapun ukuran perusahaan berkaitan erat dengan tingkat keluasan praktek *social disclosure*. Semakin besar perusahaan, semakin ekstensif saja praktek *social disclosure* yang dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan tingkat sorotan publik pada masing-masing ukuran perusahaan. Henriques dan Sadorsky (1996), menyatakan bahwa pada perusahaan besar, sorotan publik juga cukup besar, sehingga rentan terhadap serangkaian klaim pencemaran lingkungan dan sosial. Sehingga dengan demikian, antara praktek *social disclosure* dengan tipe industri, tidak dapat dilepaskan dari faktor ukuran perusahaan.

Selain itu, instrumen yang dipakai sebagai alat pengukur keluasan praktek *social disclosure* dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslim 1998, yaitu dengan menggunakan Kategori *Social Disclosure* yang dikeluarkan oleh Ernst & Ernst, 1978. Diharapkan dengan pemakaian instrumen ini, dapat mengurangi unsur subyektivitas yang muncul dalam penelitian Muslim, yang diakibatkan oleh pemakaian instrumen pengukuran yang kurang teruji validitasnya.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di muka, maka penelitian ini akan mencoba menguji kembali perbedaan tingkat ekstensifikasi praktek *social disclosure* yang diterapkan perusahaan di Indonesia berdasarkan tipe industri yaitu *high profile* dan *low profile*, dengan mempertimbangkan sektor industri sebagai variabel yang membedakan tingkat keluasan pada masing-masing tipe industri. Sesuai dengan penelitian dari Jones, 1999, pada masing – masing sektor industri ditemukan pola pertanggungjawaban sosial yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kompleksitas *stakeholders* yang dimiliki, sifat industri yang ekstraktif terhadap sumber daya alam, dan persentuhannya dengan dampak sosial yang diakibatkan oleh operasi perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini, perbedaan sektor industri dicoba untuk diuji sebagai faktor yang menentukan perbedaan pola praktek *social disclosure*.

Disamping itu, guna lebih menyempurnakan penelitian dari Muslim, 1998, maka dalam penelitian ini ditambahkan variabel ukuran perusahaan

sebagai variabel penelitian yang perlu diuji, mengingat keluasan praktek *social disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan ditentukan oleh interaksi antara faktor tipe industri dengan faktor ukuran perusahaan (Jones, 1999).

Selain itu sampel penelitian dalam penelitian ini diperluas dengan memasukkan perusahaan dalam kelompok industri manufaktur sebagai sampel penelitian karena industri manufaktur merupakan industri yang sangat kompleks *stakeholdersnya*, sehingga dimungkinkan adanya praktek *social disclosure* yang lebih ekstensif sebagai konsekuensi dari bentuk pertanggungjawaban sosialnya. Kemudian variabel yang ada dalam penelitian ini selanjutnya akan diuji dengan menggunakan instrumen pengukur tingkat ekstensifikasi praktek *social disclosure* dari Ernst & Ernst, 1978. Masalah yang diteliti, selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah perusahaan dalam tipe industri *high profile* akan lebih ekstensif dalam melakukan praktek *social disclosure* dibandingkan dengan perusahaan dalam tipe industri *low profile*.
2. Apakah perusahaan berukuran besar akan lebih ekstensif dalam melakukan praktek *social disclosure* dibandingkan dengan perusahaan berukuran menengah dan kecil.
3. Apakah perusahaan besar yang bergerak dalam tipe industri *high profile* dan berada pada sektor industri primer akan sama ekstensifnya dengan perusahaan besar yang bergerak dalam tipe industri *high profile* namun berada dalam sektor industri sekunder.

4. Apakah terdapat perbedaan tingkat ekstensifikasi praktek *social disclosure* antara perusahaan yang bergerak dalam sektor primer, sekunder dan tersier.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menemukan bukti empiris adanya penerapan praktek *social disclosure* yang lebih ekstensif oleh perusahaan dalam tipe industri *high profile* dibandingkan dengan perusahaan dalam tipe industri *low profile*.
2. Menemukan bukti empiris adanya penerapan praktek *social disclosure* yang lebih ekstensif dalam perusahaan berukuran besar dibandingkan dengan perusahaan berukuran menengah dan kecil.
3. Menemukan bukti empiris adanya penerapan praktek *social disclosure* yang sama ekstensifnya antara perusahaan besar yang bergerak dalam tipe industri *high profile* dengan perusahaan besar yang bergerak dalam tipe industri *high profile* namun berada dalam sektor industri sekunder.
4. Menemukan bukti empiris adanya perbedaan tingkat ekstensifikasi praktek *social disclosure* antara perusahaan yang bergerak dalam sektor primer, sekunder dan tersier.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan dan sosial (*social and enviromental accounting*).

Temuan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk organisasi atau pihak yang berkepentingan dengan pembuatan kebijakan akuntansi atau standar akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi sosial atau lingkungan, guna lebih dapat menjadikan praktek *social disclosure* sebagai suatu praktek pengungkapan akuntansi yang bersifat *mandatory disclosure*.

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak manajemen untuk lebih ekstensif dalam mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungannya dalam kebijakan akuntansinya.



## BAB II.

### TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Telaah Pustaka

##### 2.1.1. Social Disclosure

*Social Disclosure* oleh beberapa peneliti diartikan dalam bentuk definisi yang berbeda-beda. Menurut Gray *et. al.*, 1987 (dalam Woodward, 1997), *social disclosure* dapat diartikan sebagai :

1. *Social reporting*,

*is the process of providing information designed to discharge social accountability*

2. *Social accounting*

Dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu :

- a. *The presentation of financial information on the costs and benefits of the organization's social activities.*
- b. *The regular presentation of a formal social report by the accountable organization.*

Sedangkan menurut Blake *et. al.* (1976) (dalam Woodward, 1997), *social disclosure* diartikan sebagai suatu prosedur sistematis yang mencoba mengidentifikasi, menganalisa, mengukur, mengevaluasi dan memonitor pengaruh operasi perusahaan terhadap masyarakat/*society*. Bowman dan Haire, (1976) (dalam Woodward, 1997), mengungkapkan bahwa *social disclosure* merupakan pelaporan informasi mengenai dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Dobbins dan Witt, (1988) (dalam Woodward, 1997), mengartikan *social disclosure* sebagai bentuk pengukuran dan

pelaporan informasi yang berkonsentrasi pada masalah pengaruh aktivitas perusahaan terhadap masyarakat. Sedangkan Estes, (1976) (dalam Woodward, 1997), mengartikannya sebagai bentuk pengukuran dan pelaporan informasi baik secara internal maupun eksternal, yang berkonsentrasi pada masalah dampak keberadaan suatu entitas dan aktivitasnya terhadap masyarakat.

Kemudian dalam Gray *et. al.*, (1995b) dirangkum berbagai landasan teori yang dipergunakan oleh para peneliti bidang akuntansi sosial untuk menjelaskan kecenderungan praktek *social disclosure* dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. *Decision- Usefulness Studies.* Sebagian dari studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang mengemukakan teori ini menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh para pengguna laporan tahunan perusahaan. Para analis, banker dan pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian tersebut diminta melakukan pemeringkatan terhadap informasi akuntansi, baik yang bersifat tradisional maupun yang relatif baru dalam wacana akuntansi. Mereka menempatkan informasi aktivitas sosial perusahaan pada posisi yang "*moderately important*".
2. *Economic Theory Studies.* Studi tentang teori ekonomi dalam *corporate responsibility reporting* ini mendasarkan diri pada *economic agency theory* dan *accounting positive theory*. Penggunaan *agency theory* menganalogikan manajemen adalah agen dari suatu prinsipal. Lazimnya, prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau pemakai

tradisional lain. Namun pengertian prinsipal tersebut meluas menjadi seluruh *interest group* yang lain dari perusahaan, yaitu *stakeholders*. Sebagai agen, manajemen akan selalu berupaya untuk mengoperasikan dan mempertanggungjawabkan pengoperasiannya sesuai dengan tuntutan prinsipal, dalam hal ini termasuk *stakeholders*.

3. *Social and Political Theory Studies*. Studi di bidang ini menggunakan teori *stakeholder*, teori legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik. Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholders*. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholder* dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat kedudukan *stakeholders*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasikan diri terhadap keinginan para *stakeholders*-nya.

Dalam teori legitimasi diasumsikan bahwa perusahaan berusaha meraih legitimasi atas keberadaan dan aktivitasnya melalui praktek *social disclosure*. Dimana dalam perspektif ini, perusahaan melalui praktek *social disclosure* akan dapat menghindarkan diri dari peregulasian terhadap suatu aspek, yang dirasakan akan lebih berat dari sisi *cost* sebagai dalih mereka melakukan praktek tersebut secara sukarela.

Menurut Zadek, (1998), perusahaan perlu melakukan praktek *disclosure* atas aktivitasnya yang mempunyai dampak sosial terhadap *stakeholder* secara lebih terbuka. Hal ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan. Dengan keterbukaan tersebut, diharapkan lingkungan yang jujur dan dapat dipercaya yang

diharapkan oleh *stakeholder* dapat tercipta. Disamping itu, dengan praktek *social disclosure* yang lebih luas, maka komitmen dari pekerja (sebagai bagian dari *stakeholders*) akan lebih tinggi dimasa mendatang, dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan lebih tinggi. Konsumen tidak akan percaya terhadap klaim yang dikeluarkan oleh perusahaan, tanpa adanya pendekatan yang sistematis. Pendekatan yang sistematis tersebut salah satu bentuknya adalah *social disclosure*.

Selanjutnya menurut Zadek pula, perusahaan melihat adanya pengaruh persepsi publik terhadap kinerja lingkungan dan sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan informasi secara sistematis yang dapat menghindarkan publik dari sikap sinis dan skeptis. Praktek *social disclosure* menurutnya dipandang sebagai suatu elemen integral dari proses komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya. Dalam proses ini, *social disclosure* dalam bentuk laporan tahunan perusahaan merupakan media yang mengkomunikasikan bahwa keinginan *stakeholders* perusahaan didengarkan kepentingannya. Disamping itu, *social disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dijadikan penilaian bagi manajer untuk mengukur seberapa besar pemahaman mereka terhadap lingkungan sosial dari perusahaan dan sebagai dasar pembuatan keputusan. Dengan kata lain, praktek *social disclosure* merupakan elemen penting dari proses komunikasi, dialog, pembelajaran, dan proses pembuatan keputusan.

### 2.1.2. Tipe industri

Telah banyak penelitian akuntansi sosial yang mencoba untuk menguji *social disclosure* pada berbagai perusahaan yang memiliki perbedaan karakteristik. Salah satunya yang menjadi perhatian para peneliti adalah tipe industri yang didasarkan pada tingkat sensitivitasnya terhadap lingkungan, yaitu *high profile* dan *low profile*. Robert (dalam Hackston dan Milne, 1996) mencoba mendefinisikan *high profile companies* sebagai perusahaan yang memiliki *consumer visibility*, tingkat resiko politik dan tingkat kompetisi yang tinggi. Sedangkan *low profile companies* didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki tingkat *consumer visibility* dan *political visibility* yang rendah.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat diartikan bahwa keberadaan *stakeholders* yang dimiliki perusahaan antara lain konsumen, pesaing, dan pihak-pihak lain yang dapat melakukan tekanan politik, menjadi faktor penentu utama terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Henriques dan Sadorsky, 1999). Selain itu, perusahaan dengan tipe industri *high profile*, pada umumnya sangat rentan terhadap perhatian publik. Oleh karena itu, perusahaan dalam profil demikian, perlu untuk mendengarkan dan mengakomodasikan kepentingan dan kemauan kelompok *stakeholders* tersebut dalam suatu bentuk kebijakan perusahaan, salah satunya adalah dalam hal kebijakan akuntansi (Shrivastava, 1995). Sesuai dengan teori legitimasi yang diungkapkan oleh Lindblom (1994) dan *stakeholder theory* yang diungkapkan oleh Ullmann (1985) dan Roberts (1992), maka kebijakan akuntansi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk praktek

*social disclosure* yang dilakukan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Perusahaan yang bertipe industri *high profile* diyakini melakukan praktek *social disclosure* lebih ekstensif dibandingkan dengan perusahaan yang bertipe industri *low profile*. Sebagai ilustrasi, Diekers dan Preston (dalam Hackston dan Milne, 1996) menggambarkan industri yang *high profile* sebagai berikut :

*.....companies whose economic activities modify the environment, such as extractive industries, are more likely to disclose information about their environmental impacts than are companies in other industries.*

Cowen *et.al.* (1987) (dalam Hackston dan Milne, 1996) menambahkan karakteristik perusahaan tipe *high profile industry* sebagai berikut :

*.....Consumer- oriented companies can be expected to exhibit greater concern with demonstrating their responsibility to the community, since this is likely to enhance corporate image and influence sales.*

Robert & Beliveau (1994); Lerner & Fryxell, (1988) (dalam Jones, 1999) menyatakan bahwa, industri berdasarkan sensitivitasnya terhadap kerusakan lingkungan dan tanggung jawab sosialnya dapat dikategorikan dalam kategori *high profile* dan *low profile*. Kategori *high profile* dikarakteristikan sebagai industri yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan sehingga dituntut memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi pula. Hal tersebut disebabkan oleh operasi perusahaan yang banyak memodifikasi lingkungan dan melibatkan *stakeholder* yang kompleks. Sedangkan kategori *low profile* dikarakteristikan sebagai industri yang kurang sensitif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan sehingga tidak dituntut untuk memiliki

tanggung jawab sosial yang tinggi seperti halnya industri *high profile*. Jones (1999) menjelaskan lebih lanjut, bahwa tingkat tanggung jawab sosial tersebut berbeda-beda berdasarkan masing-masing sektor, apakah *primary*, *secondary*, ataupun *tertiary*. Industri bersektor primer meliputi pengolahan bahan baku (*raw materials extraction*), pertanian, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keduanya. Kelompok *stakeholder* yang paling berkepentingan biasanya adalah aktivis lingkungan; dikarenakan industri pada sektor ini paling banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan kata lain, industri pada sektor primer dapat dikatakan bertipe *high profile*. Karena rentan terhadap serangkaian potensi resiko politik (kecaman kaum aktivis).

Industri yang bergerak pada *secondary sector* mentransformasikan bahan baku ke dalam produk setengah jadi melalui proses pabrikasi. Kelompok *stakeholder* yang relevan untuk kelompok industri ini adalah pekerja, pemasok, konsumen, pemerhati lingkungan dan masyarakat sekitar. Industri pada sektor ini (misalnya automobiles dan elektronik) adalah yang paling besar dan intensif dalam penggunaan modal. Sehingga dengan demikian, merekalah yang paling ekstensif dan kompleks *stakeholders*-nya. Karena kompleks dan ekstensifnya *stakeholder* yang dimiliki, maka semakin rentan pula potensi resiko politik yang harus dihadapi. Industri dalam sektor ini dapat dikatakan bertipe *high profile*.

Sedangkan industri jasa yang berada pada sektor tersier terdiri dari industri perbankan, pelayanan kesehatan, serta jasa sekuritas. Industri pada sektor ini bersifat *labor intensive* (Jones, 1999), dan kelompok

*stakeholder* yang utama adalah konsumen dan tenaga kerja. Industri pada sektor ini kurang begitu sensitif terhadap masalah-masalah kerusakan lingkungan, sehingga dapat digolongkan ke dalam tipe industri *low-profile*.

Disamping dilihat dari sisi *stakeholdernya*, serangkaian pengaruh resiko potensi politik dan *consumer visibility* yang tinggi dapat dilihat dari apakah industri tersebut berorientasi pada menghasilkan barang konsumsi atau industri. Menurut Lerner & Fryxell (1988); dan Miles (1987) (dalam Jones, 1999) industri yang berorientasi pada barang konsumsi akan lebih sensitif terhadap masalah keamanan produk dan lingkungan sekitar, dan hal ini dapat secara langsung berpengaruh terhadap persepsi konsumen dan keputusan pembelian. Selain itu, tingginya campur tangan pemerintah lebih banyak didapatkan pada industri berorientasi pada barang konsumsi (Greening & Gray, 1994 dalam Jones, 1999). Pada industri semacam demikian, dapat dikatakan bersifat *high profile*.

Penjelasan lain mengenai *high profile industry*, dapat dilihat pula dalam Porter, (1980), dan Saul, (1996), yaitu mengenai tingkat persaingannya yang tinggi. Pada industri-industri yang sifat pasarnya oligopolis, akan lebih bertipe *high profile*. Pada industri –industri ini mereka akan lebih banyak mempertanggungjawabkan kinerja sosial dan lingkungannya.

### 2.1.3. Ukuran Perusahaan (*Company Size*)

Besar kecilnya perusahaan diduga mempunyai pengaruh terhadap keluasan praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan



(Trotman & Bradley, 1981; Cowen *et.al.*, 1987 dalam Theo, *et.al.*, 1997). Chen dan Metcalf, (1980) (dalam Theo, *et.al.*, 1997) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, sebagai variabel yang berpengaruh terhadap hubungan aktivitas lingkungan dan sosial perusahaan dengan indikator keuangan (*financial indicators*). Bagaimanapun, ukuran besar kecilnya perusahaan selalu berhubungan dengan industri yang sensitif terhadap lingkungan dan tidak dapat digeneralisasi ke industri yang tidak sensitif terhadap lingkungan (Deegan & Gordon, 1994).

Ada beberapa alasan rasional yang melandasi pengambilan ukuran perusahaan sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap keluasan praktek *social disclosure* tersebut. Pertama, perusahaan besar akan selalu memiliki *political visibility* atau *political costs* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil (Watts & Zimmerman, 1986; Deegan & Carroll, 1993 dalam Theo, *et.al.*, 1997). Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan praktek *social disclosure* dengan tujuan untuk mengurangi biaya politis (*political costs*) (Deegan & Gordon, 1994), atau *political visibility* (Belkaoui & Karpik, 1989). Disamping itu, perusahaan besar lebih rentan terhadap perhatian publik, pemerintah, dan kelompok pemerhati lingkungan dan sosial. Atau dengan kata lain lebih sering mendapatkan tekanan politis dari publik. Guna menghindari klaim, maka manajemen perusahaan berusaha mengembangkan kebijakan dan strategi yang berwawasan lingkungan dan sosial dengan melaporkan kinerja lingkungan dan sosialnya dalam laporan tahunan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pada publik bahwa aktivitas mereka selaras dengan

lingkungan, sehingga dengan demikian stabilitas perusahaan akan terjaga (Elkington, 1994; Greeno dan Robinson, 1992 dalam Theo, *et.al.*, 1997). Strategi tersebut dijalankan oleh perusahaan besar dengan tujuan lain adalah untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder*-nya. Dengan adanya legitimasi, maka perusahaan dapat menghindar dari tuntutan ganti rugi biaya pencemaran lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas operasinya.

Alasan kedua adalah perusahaan besar biasanya lebih memiliki aktivitas lingkungan yang baik, hal ini diduga karena adanya modal besar yang dimiliki sehingga lebih mampu untuk menyusun kebijakan dan strategi yang berwawasan lingkungan dan sosial (Spicer, 1978; Chen & Metcalf, 1980 dalam Theo, *et.al.*, 1997). Selain itu, menurut Pruzan, (1998) dan Zadek, (1998) pada perusahaan besar sering berintensitas modal besar pula, sehingga diperlukan ukuran pengawasan yang lebih mendetail dan ketat. Ukuran tersebut tidak cukup dengan ukuran perspektif keuangan saja, namun harus dengan ukuran perspektif yang lain, salah satunya lingkungan sosial, guna lebih mendayagunakan modal yang ada. Alasan ketiga adalah perusahaan besar lebih mampu membiayai pembuatan informasi kinerja lingkungan, yang sudah barang tentu harus menggunakan tenaga ahli tertentu dengan biaya yang tidak sedikit.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Pengambilan variabel tipe industri dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini, disamping mengacu kepada landasan teoritis yang ada, juga didasarkan pada sejumlah penelitian sejenis yang telah dilakukan

terdahulu. Hackston & Milne (1996) dan Andrew *et.al.*, (1989) (dalam Muslim, 1998) membuktikan bahwa perusahaan besar yang ada di New Zealand dan Malaysia dan Singapura melakukan praktek *social disclosure* yang lebih ekstensif dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Temuan lain yang didapatkan oleh Hackston dan Milne tersebut juga membuktikan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang bertipe *high profile*, praktek *social disclosure* dilakukan lebih ekstensif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang bertipe *low-profile*. Temuan yang sama dikemukakan pula oleh peneliti lain yaitu Adams *et.al.* (1997), yang meneliti praktek *social disclosure* pada enam negara di Eropa (Perancis, Jerman, Swiss, Inggris, Swedia dan Belanda) terhadap perusahaan – perusahaan yang terdapat dalam empat kelompok industri; minyak, kimia, logam dan pembangkit energi; kemudian manufaktur dan otomotif; rekayasa dan konstruksi; serta jasa, makanan dan minuman, dan ritail. Adams *et.al.* (1997) mengkategorikan keempat kelompok tersebut menjadi dua kelompok besar, dua kelompok pertama mewakili industri yang sensitif, sedangkan dua kelompok terakhir mewakili industri yang kurang sensitif. Mereka menemukan bukti bahwa terdapat perbedaan praktek *social disclosure* antara industri yang sensitif dan industri yang kurang sensitif. Disamping itu, ditemukan pula bukti bahwa pada perusahaan besar terbukti lebih banyak melakukan praktek *social disclosure* dibandingkan perusahaan kecil. Sementara itu, Andrew *et.al.* (1989) (dalam Muslim, 1998) yang meneliti praktek *social disclosure* pada 119 perusahaan sampel di Malaysia dan Singapura menemukan bukti bahwa

praktek *social disclosure* dilakukan oleh 50% perusahaan besar, dan 43% perusahaan berskala menengah serta 14% perusahaan berskala kecil.

Sedangkan Jones, 1999, menemukan bukti bahwa perbedaan sektor industri berkaitan erat dengan perbedaan pola pertanggungjawaban sosial. Pada perusahaan yang bergerak dalam sektor industri primer yang bersifat *high profile*, dimana kegiatannya bersifat ekstraktif terhadap sumber daya alam, pertanggungjawaban sosialnya lebih banyak ditujukan kepada kelompok aktivitas lingkungan, atau lebih banyak mengungkap kinerja lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Sedangkan pada perusahaan yang bergerak dalam sektor industri sekunder dimana *stakeholders* yang dimiliki bersifat paling kompleks, pola pertanggungjawaban sosialnya lebih banyak mengungkap kinerja perusahaan yang berkaitan dengan kebutuhan *stakeholders*-nya. Antara lain pengungkapan dalam bidang sumber daya manusia, yang ditujukan bagi pekerja perusahaan, kemudian produk yang ditujukan bagi konsumen. Namun demikian, dalam mengungkapkan kinerja sosialnya tersebut, keduanya sama ekstensifnya. Sedangkan pada perusahaan yang bergerak dalam sektor industri tersier, atau bersifat *low profile*, pengungkapan kinerja sosialnya dapat dikatakan kurang ekstensif dibandingkan dengan kedua sektor industri diatas. Hal tersebut disebabkan oleh sifat industrinya yang kurang begitu melibatkan *stakeholders* dalam operasinya dan tidak banyak memodifikasi sumber daya natural yang ada disekelilingnya. Selanjutnya perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian tentang Praktek *Social Disclosure*

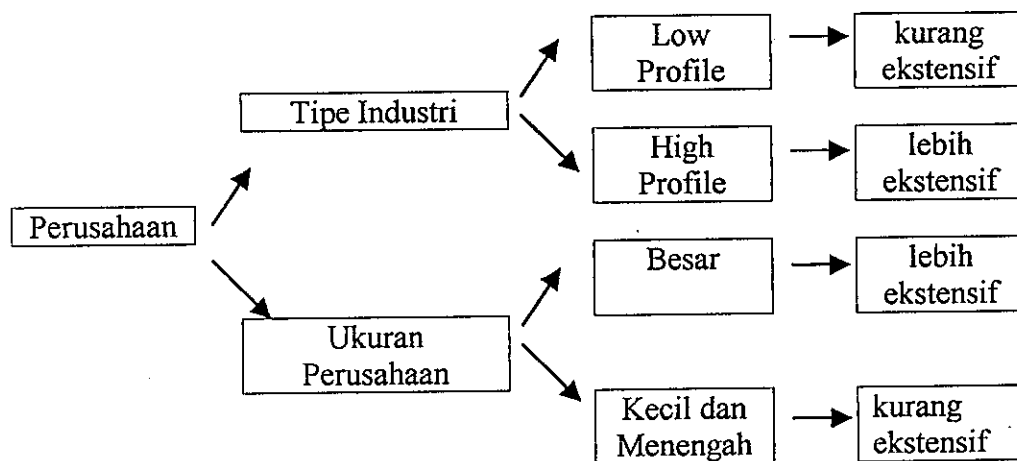
Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Pengujian
Andrew <i>et.al.</i>	1989	Ukuran Perusahaan	Anova	Signifikan
Adams <i>et.al</i>	1997	Tipe Industri	Uji Z	Signifikan
Hackston & Milne	1996	Ukuran Perusahaan Tipe Industri	Uji Z	Signifikan Signifikan
Muslim	1998	Tipe Industri	Uji Z	Signifikan
Penelitian ini	2002	Tipe industri dengan mempertimbangkan sektor industri dan ukuran perusahaan	Anova T test	Signifikan

Sumber : data sekunder diolah

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori dan temuan-temuan penelitian yang menguji perbedaan pola praktek *social disclosure* pada dua tipe industri yaitu *high profile* dengan *low profile* dan pada tiga ukuran perusahaan yaitu besar, menengah dan kecil, dimana pada kedua tipe industri tersebut terdapat perbedaan tingkat sensitivitas terhadap kerusakan lingkungan dan keluasan cakupan *stakeholders* yang dimiliki. Kemudian pada ketiga ukuran perusahaan tersebut terdapat perbedaan modal yang berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan strategi dan kebijakan yang berwawasan lingkungan dan sosial dan tingkat perhatian publik terhadap perusahaan. Keempat faktor tersebut diatas, menyebabkan perbedaan pola praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan dalam masing-masing

tipe industri dan ukuran perusahaan. Pada perusahaan yang bertipe *high profile* yang tergolong dalam kelompok *primary* dan *secondary sector*, dimana bersifat ekstraktif dan memiliki *stakeholders* yang bersifat kompleks, praktek *social disclosure* yang diterapkan lebih ekstensif, mencakup pengungkapan dalam aspek lingkungan, tenaga kerja, kemasyarakatan dan konservasi energi dan produk. Sedangkan pada perusahaan yang bertipe *low profile*, yang tergolong dalam kelompok *tersier sector*, praktek *social disclosure* yang diterapkan cenderung kurang ekstensif. Praktek *social disclosure* yang dilakukan hanya mencakup pengungkapan pada aspek tenaga kerja, kemasyarakatan dan produk saja. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya *stakeholders* yang dimiliki dan rendahnya tingkat dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitasnya (Jones, 1999). Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis diatas, maka model penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian Perbedaan Ekstensifikasi Praktek *Social Disclosure* pada Perusahaan Bertipe Industri *High Profile* dan *Low Profile* serta pada Perusahaan Berskala Besar dan Menengah & Kecil.

## 2.4. Perumusan Hipotesis

Selanjutnya berdasarkan model penelitian pada Gambar 1., diajukan hipotesis (Ha) mengenai perbedaan ekstensifikasi praktek *social disclosure* berdasarkan tipe industri dan ukuran perusahaan sebagai berikut :

- H1 : Perusahaan yang bergerak dalam industri yang bertipe *high profile* akan lebih ekstensif dalam melakukan praktek *social disclosure* dibandingkan dengan perusahaan yang bertipe *low profile*.
- H2 : Perusahaan yang berukuran besar akan lebih ekstensif dalam melakukan praktek *social disclosure* dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran menengah dan kecil.
- H3 : Perusahaan besar yang bergerak dalam tipe industri *high profile* dan berada pada sektor industri primer akan sama ekstensifnya dengan perusahaan besar yang bergerak dalam tipe industri *high profile* namun berada dalam sektor industri sekunder.
- H4 : Terdapat perbedaan tingkat ekstensifikasi praktek *social disclosure* antara perusahaan yang bergerak dalam sektor primer, sekunder dan tersier.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, berupa laporan tahunan (*annual report*) tahun 2001 yang dikeluarkan oleh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Jakarta dan Daftar Klasifikasi Industri yang terdapat dalam JSX Fact Books 2001.

##### 3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini, seperti penelitian-penelitian lainnya yang menguji pengaruh tipe industri dan ukuran perusahaan terhadap praktek *social disclosure* (misal, Patten, (1991); Dierkes dan Preston, (1977); Robert, (1992); Hackston & Milne, (1996); Choi, (1998); Gray *et.al.*, (1995a), dan di Indonesia oleh Muslim (1998), menggunakan populasi perusahaan – perusahaan yang *go public* pada Bursa Efek. Oleh karena itu, populasi penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan yang *go public* pada PT. Bursa Efek Jakarta yang dimuat dalam *Indonesian Capital Market Directory* 2001.

Pengambilan sampel dilakukan secara random dengan ketersediaan data yang dapat diperoleh dengan membedakan jenis industri. Adapun jumlah perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta menurut *Indonesian Capital Market Directory* 2001 sejumlah 304 perusahaan. Sehingga jumlah populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 304 perusahaan yang terbagi dalam 42 blok/sektor/jenis industri. Jumlah



sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 71 perusahaan, yang dihitung berdasarkan rumus Babbie & Earl, 1983 (dalam Hackston & Milne, 1996) sebagai berikut :

$$n = \frac{N.pq}{(N-1).D + pq}$$

$$D = \frac{B^2}{4}$$

Dimana :

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- p = nilai yang meminimkan resiko *sampling error* = 0,5
- q = (1 - p) = 0,5
- B = Bound of error (10%)

Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *proportionate stratified random sampling*. Dari 71 perusahaan, kemudian ditentukan proporsi masing-masing industri sebesar 23%, dengan langkah sebagai berikut :

1. Total sampel dibagi dengan total populasi maka dihasilkan proporsi masing-masing industri (dalam %), yaitu  $71 / 304 \times 100 \% = 23 \%$
2. Proporsi masing-masing industri (dalam %) kemudian dikalikan dengan jumlah perusahaan dalam industri, akan menghasilkan jumlah perusahaan sampel yang akan mewakili dalam industrinya.
3. Hasil perkalian nomor 2. di atas, kemudian dipilih secara random untuk menentukan perusahaan yang akan mewakili dalam industrinya, seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Proporsi Perusahaan Sampel Penelitian

Sektor Industri	Jumlah perusahaan	Proporsi (%)	Jumlah Perusahaan Sampel
Pertanian	8	23	3
Pertambangan	6	23	3
Industri dasar dan kimia	55	23	13
Aneka Industri	50	23	12
Barang konsumsi	39	23	9
Properti	31	23	7
Infrastruktur dan transportasi	13	23	3
Perdagangan, jasa dan investasi	47	23	10
Keuangan	49	23	11

Sumber : data sekunder diolah

Guna mengantisipasi perusahaan sampel yang tidak menyediakan data laporan tahunan yang dibutuhkan, maka penelitian ini akan menggunakan *resampling* untuk mengganti data yang tidak tersedia, sehingga tiap blok tetap terwakili dengan jumlah sampel yang proporsional. Teknik *resampling* tersebut tetap mengacu pada metode *proportionate stratified random sampling* pada blok-blok yang memerlukan penggantian data tersebut. Selain itu, perusahaan yang tidak memberikan informasi mengenai jumlah assetnya dikeluarkan dari sampel.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengetahui perbedaan praktek *social disclosure* adalah *proportionate stratified sampling*. Stratifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini mengikuti stratifikasi yang berlaku di BEJ. Guna merepresentasi seluruh populasi,

maka diambil seluruh sektor dan seluruh blok yang terdapat praktek *social disclosure* didalamnya. Dari masing-masing sektor industri yang terbagi-bagi lagi dalam jenis industri, diambil jumlah sampel yang dianggap proporsional.

Selanjutnya seluruh sampel diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu kategori tipe industri, terdiri atas industri yang bertipe *high profile* yang terdiri dari perusahaan perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan, transportasi dan pariwisata, dan industri yang bertipe *low profile* yang terdiri dari bangunan, keuangan dan perbankan, *supplier* peralatan medis, properti, *retailer*, tekstil dan produk tekstil, produk keperluan pribadi, dan produk rumah tangga, dan kategori ukuran perusahaan, yang terdiri dari perusahaan besar, menengah dan perusahaan kecil yang didasarkan pada jumlah *total asset*nya. Disamping itu, sampel yang diperoleh dikategorikan pula ke dalam sektor-sektor industri, yaitu primer, sekunder, dan primer. Pengelompokan ke dalam sektor tersebut, sesuai dengan sektor-sektor yang ada dalam stratifikasi di Bursa Efek Jakarta.

### **3.4. Definisi Operasional Variabel**

#### **3.4.1. Tipe Industri**

Tipe industri dalam penelitian ini didefinisikan berdasarkan tingkat sensitivitasnya terhadap kerusakan lingkungan, tingginya *consumer visibility*, tingkat resiko politik dan tingkat kompetisi sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan oleh Robert, Diekers & Preston, (1996) dan Cowen *et.al.* (1997) dalam Muslim (1998) sebagai tipe *high profile* yang terdiri dari perusahaan perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan, transportasi dan pariwisata, dan industri yang bertipe *low profile* yang terdiri dari bangunan, keuangan dan perbankan, *supplier* peralatan medis, properti, *retailer*, tekstil dan produk tekstil, produk keperluan pribadi, dan produk rumah tangga. Selanjutnya kelompok perusahaan yang tergolong dalam tipe industri *high profile*, dikelompokkan kembali ke dalam sektor primer dan sektor sekunder, sesuai dengan jenis industrinya. Pengelompokan ini mengikuti aturan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta, yaitu untuk sektor primer adalah industri yang langsung mengolah hasil sumber daya natural, antara lain pertanian (sektor 1) dan pertambangan (sektor 2). Sedangkan yang tergolong dalam sektor sekunder adalah yang mengolah *raw material* menjadi barang setengah jadi, diantaranya adalah industri dasar dan kimia (sektor 3), industri barang konsumsi (sektor 5), dan industri lain-lain (sektor 4). Sedangkan tipe industri *low profile* yang identik dengan sektor tersier, terdiri dari properti dan real estate (sektor 6), transportasi dan infrastruktur (sektor 7), keuangan (sektor 8), dan perdagangan, jasa dan investasi (sektor 9).

### 3.4.2. Praktek *Social Disclosure*

Definisi operasional praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya item – item *social disclosure* yang diungkapkan dalam laporan tahunan/ *annual report* yang dikeluarkan oleh perusahaan (Gray *et.al.*, 1995b; Andrew *et.al.*, 1989; dan Guthrie & Parker, 1990) atau berdasarkan tingkat intensitasnya. Pengukuran variabel keluasan praktek *social disclosure* ini, menggunakan instrumen penelitian berupa suatu daftar (*check list*) *social disclosure* yang dikeluarkan oleh Ernst & Ernst (1978) (dalam Carol, 1994) yang memuat 27 item. Daftar tersebut terbagi dalam tujuh kategori/tema, antara lain (1) lingkungan/*environment* (2) energi/*energy* (3) praktek bisnis yang sehat/*fair business practices* (4) sumber daya manusia/*human resources* (5) kemasyarakatan/*community involvement* (6) produk/ *products* dan (7) pengungkapan tanggung jawab sosial yang lain, sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.

### 3.4.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada ukuran modal yang dimiliki perusahaan, sesuai dengan penelitian Hackston & Milne (1996). Ukuran perusahaan tersebut terdiri dari besar, menengah dan kecil. Adapun dasar pengukuran yang dipakai adalah *total asset*. Dalam konteks ini kriteria perusahaan besar dan menengah dan kecil adalah sesuai dengan kriteria Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 13/M/SK-I/3/1990 yang pada dasarnya menyatakan bahwa kelompok industri besar adalah perusahaan industri yang memiliki asset lebih dari Rp. 500.000.000.000,00. Sedangkan perusahaan yang memiliki

asset antara >Rp 200.000.000.000,00 - < Rp 500.000.000.000,00 diasumsikan termasuk dalam kategori menengah. Kemudian < Rp 200.000.000.000,00 digolongkan dalam kelompok perusahaan kecil.

Kriteria ini diambil, karena sejauh ini belum ada penggolongan ukuran perusahaan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik ataupun Bursa Efek Jakarta.

### 3.5. Teknik Analisis

Untuk menganalisa tingkat ekstensifikasi praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan, maka digunakan metode *content analysis*, yaitu metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat pendugaan (*inference*) atas suatu teks (Weber, 1992). Teks yang ada dikodifikasi ke dalam beberapa kelompok atau kategori berdasarkan kriteria tertentu (Weber dan Choi, 1998 dalam Muslim, 1998). Metode ini telah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan antara lain oleh Gray *et.al.*, (1995a), Andrew *et.al.*, (1989), dan Muslim (1998).

Selanjutnya dengan menggunakan instrumen penelitian daftar pengungkapan, dilakukan penelusuran item – item yang diungkap dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dari hasil penelusuran tersebut, akan dipetakan praktek *social disclosure* yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perbedaan keluasan perusahaan – perusahaan di Indonesia dalam mengungkapkan informasi sosial yang telah dilakukan.

Kemudian dilanjutkan dengan pengujian perbedaan jumlah item yang diungkap oleh perusahaan-perusahaan pada kedua kategori industri yang didasarkan pada sektor industri dan ukuran perusahaan yang diteliti. Pengukuran ini dimaksudkan untuk menguji adanya perbedaan tingkat keluasan *disclosure* antara perusahaan yang bertipe industri *high profile* yang dibagi lagi ke dalam sektor primer dan sekunder dengan yang bertipe industri *low profile* serta perbedaan tingkat keluasan *disclosure* antara perusahaan yang berukuran besar dengan perusahaan yang berukuran menengah dan kecil. Untuk tipe *high profile* dilabelkan dengan angka "1", dan untuk tipe *low profile* dilabelkan dengan angka "2". Kemudian untuk sektor primer dilabelkan dengan "1", sektor sekunder dilabelkan dengan "2", dan sektor tersier dilabelkan dengan angka "3". Demikian pula dengan ukuran besar, dilabelkan dengan angka "1", sedangkan ukuran menengah dan kecil dilabelkan dengan angka "2" dan "3". Tujuan pelabelan ini adalah untuk memudahkan pengolahan data ke dalam statistik deskriptif dan alat uji beda Anova yang menggunakan program SPSS Versi 10.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka instrumen statistik yang digunakan untuk menguji kelima hipotesis tersebut adalah uji statistik parametrik Anova, dimana sampel yang ada lebih dari 2 (ukuran terdiri dalam 3 kelompok sampel, tipe industri terdiri dalam 3 kelompok sektor industri). Selain itu dapat melihat pula interaksi antara ukuran perusahaan, sektor industri dan tipe industri yang menentukan perbedaan keluasan praktek *social disclosure*. Penggunaan statistik parametrik dalam

penelitian ini juga mempertimbangkan pentingnya melihat parameter-parameter tertentu dalam statistik seperti mean dan varians populasi untuk menarik kesimpulan bahwa tingkat keluasaan praktek *social disclosure* dari salah satu tipe industri atau sektor industri lebih ekstensif dibandingkan tipe atau sektor yang lain, demikian pula dengan ukuran perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji satu arah, yaitu melihat salah satu bersifat “lebih” dibanding yang lain.

Sehubungan dengan pemakaian statistik parametrik, maka diperlukan uji normalitas data, guna melihat apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari populasi yang sama (Singgih, 2002). Data atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 71, maka sesuai dengan asumsi *central limit theorem*, jika data  $(n) > 25$  maka diindikasikan berdistribusi normal (Mendenhall & Beaver, 1992). Namun demikian tetap dilakukan uji normalitas data, yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai *liliefors* hitung  $<$  *liliefors* tabel, atau probabilitas dari uji Kolmogorov – Smirnov yang identik dengan *liliefors*  $>$  taraf signifikansi 0,05. Disamping itu juga dengan melihat nilai signifikansi yang ada dalam uji Shapiro-Wilk, jika probabilitas yang ada  $>$  taraf signifikansi 0,05, maka distribusi frekuensi yang dimiliki oleh data dapat adalah distribusi normal. Kriteria lain untuk menentukan distribusi normal adalah (Sugiyono, 2000) :

1. Rasio skewness ( $\text{skewness}/\text{S.E.skewness}$ ) berada dalam kisaran  $-2$  dan  $+2$ .



2. Rasio kurtosis (kurtosis/S.E. kurtosis) berada dalam kisaran  $-2$  dan  $+2$ .
3. Sebaran data berada pada sekeliling garis kurva normal Q-Q Plots.
4. Median berada persis di tengah Box plot.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka untuk menguji hipotesa 1 digunakan uji T untuk satu sampel. Selanjutnya, dengan menggunakan uji Anova, hipotesa 2, 3, dan 4 yang ada diuji. Adapun kriteria penerimaan hipotesa adalah sebagai berikut :

**1. Hipotesa 1**

Ha diterima jika probabilitas  $t$  hitung  $> t$  tabel atau jika probabilitas  $< 0,05$ .

**2. Hipotesa 2, 3, dan 4**

Ha diterima jika probabilitas  $< 0,05$ , atau jika  $F$  hitung  $> F$  tabel.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Perusahaan Sampel

Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Jakarta yang terdapat dalam *Capital Market Directory* 2001. Sampel yang dipergunakan sebanyak 71 perusahaan yang diambil secara acak berdasarkan stratifikasi industri yang berlaku di Bursa Efek Jakarta. Adapun kriteria perusahaan yang dapat diambil sebagai sampel adalah perusahaan yang mengeluarkan *annual report* 2001 di Bursa Efek Jakarta dan melakukan praktek *social disclosure*. Sejumlah 71 perusahaan sampel tersebut tergolong dalam 9 kategori industri, yang terbagi lagi menjadi 42 jenis industri. Namun demikian, tidak semua perusahaan dalam setiap jenis industri selalu dapat dijumpai adanya praktek *social disclosure*. Oleh karena itu, perusahaan sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya dapat mewakili 27 jenis industri. Perusahaan sampel yang dipergunakan sebagai sampel penelitian memiliki total asset berkisar antara 51 milyar rupiah sampai dengan 96.188 milyar rupiah. Perusahaan sampel yang memiliki total asset terbesar adalah Bank Central Asia (perusahaan bersektor industri keuangan bertipe *low profile* dan tergolong dalam kategori perusahaan besar) yaitu 96.188 milyar, sedangkan perusahaan sampel yang memiliki total asset terkecil adalah Trafindo Perkasa (perusahaan industri

konstruksibangunan bertipe *low profile* dan terkategori dalam perusahaan menengah dan kecil) dengan total asset sebesar 51 milyar rupiah.

#### **4.2. Profil Perusahaan Sampel**

Perusahaan sampel yang ada mewakili seluruh klasifikasi atau stratifikasi industri yang ada di Bursa Efek Jakarta. Adapun komposisi perusahaan sampel tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Perusahaan Sampel yang *Listed* dan Melakukan Praktek *Social Disclosure* dalam *Annual Report* di BEJ Tahun 2001

No.	Jenis Industri	Tipe Industri	Jumlah
1.	Pertanian	High Profile	3
2.	Kehutanan	High Profile	1
3.	Pertambangan	High Profile	4
4.	Industri Dasar dan Kimia	High Profile	8
5.	Makanan dan Minuman	High Profile	4
6.	Tembakau dan rokok	High Profile	3
7.	Infrastruktur dan Transportasi	Low Profile	2
8.	Otomotif dan Komponen	High Profile	3
9.	Kertas dan Pulp	High Profile	2
10.	Makanan Ternak	High Profile	2
11.	Mesin dan Peralatan Berat	High Profile	2
12.	(Engeneering)		5
13.	Retail	Low Profile	1
14.	Footwear	Low Profile	3
15.	Restoran, Hotel & Jasa Pariwisata	Low Profile	5
16.	Keuangan	Low Profile	1
17.	Pelayanan Kesehatan	Low Profile	2
18.	Tekstil dan hasil tekstil	High Profile	4
19.	Real Estate & Properti	Low Profile	1
20.	Komputer	Low Profile	4
21.	Peralatan Rumah tangga	Low Profile	1
22.	Elektronik	Low Profile	2
23.	Perdagangan	Low Profile	2
24.	Konstruksi Bangunan	Low Profile	1
25.	Media dan Komunikasi	High Profile	2
26.	Industri Perkayuan	High Profile	2
27.	Farmasi	High Profile	2
Jumlah			71

Sumber : JSX Fact Books 2001

Apabila dilihat dari variabel ukuran perusahaan, yang dinilai dari nilai total asset yang dimiliki, perusahaan yang terpilih sebagai sampel memiliki keragaman. Keragaman ukuran perusahaan yang tergolong dalam dua kategori yaitu perusahaan besar ( $\geq 500$  milyar rupiah) dan

perusahaan menengah dan kecil ( $\leq 500$  milyar rupiah) yang dikelompokkan berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 13/M/SK-I/3/1990 terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Komposisi Perusahaan-Perusahaan Sampel Berdasarkan Ukuran Perusahaan

Kategori Perusahaan	Tipe High Profile	Tipe Low Profile	Total
Besar	37	17	54
Menengah	4	7	11
Kecil	-	5	5

Sumber : JSX Fact Book 2001 diolah

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan gambaran mengenai keluasan praktek *social disclosure*, yang dihitung berdasarkan instrumen pengukur *social disclosure* Ernst & Ernst 1978 yang terdiri dari 27 item pengungkapan, seperti tertera pada Tabel 5, yang merupakan hasil pengolahan dari data yang ditabulasi dalam lampiran 2. Tingkat keluasan tersebut menggambarkan rata-rata tingkat intensitas perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 berdasarkan masing-masing sektor industri dalam melakukan *social disclosure* atau pengungkapan sosial.

Tabel 5. Komposisi Tingkat Keluasan Praktek *Social Disclosure* (dari 27 item) Perusahaan-Perusahaan Sampel Berdasarkan Tipe Industri

No.	<i>High Profile</i>		<i>Low Profile</i>	
	Sektor Industri	Rerata	Sektor Industri	Rerata
1.	Pertanian	13,00	Retail	3,40
2.	Kehutanan	11,00	Footwear	3,00
3.	Pertambangan	17,50	Keuangan	2,80
4.	Industri Dasar & Kimia	9,37	Restoran, Hotel &	3,00
5.	Tembakau & rokok	12,50	Jasa Pariwisata	
6.	Makanan & minuman	12,75	Elektronik	6,00
7.	Otomotif & komponen	11,25	Real Estate &	4,50
8.	Kertas & Pulp	13,00	Properti	
9.	Farmasi	10,00	Komputer	3,00
10.	Makanan Ternak	10,00	Peralatan Rumah	5,00
11.	Mesin & Peralatan Berat	10,73	Tangga	
12.	Industri Perkayuan	9,00	Pelayanan Kesehatan	4,00
13.	Tekstil dan produk tekstil	12,00	Perdagangan	4,50
14.			Media dan	5,00
15.			Komunikasi	
16.			Konstruksi Bangunan	3,50
			Infrastruktur dan transportasi	7,00
	Rerata	13,21	Rerata	4,23

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa perusahaan sampel yang paling banyak melakukan praktek *social disclosure* dalam laporan tahunannya adalah perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri pertambangan dengan rerata sebesar 17,5 (bertipe *high profile* sektor primer), disusul kemudian oleh perusahaan sampel dalam kelompok industri pertanian dan kertas dan pulp sebesar 13,00 (bertipe *high profile* sektor primer) kemudian disusul dengan makanan dan minuman dengan rerata sebesar 12,75 (bertipe *high profile* sektor sekunder). Sedangkan pada kelompok

masing- masing jenis industri hanya berkisar antara 2,8 (kelompok industri keuangan) sampai dengan yang tertinggi 7 (kelompok industri tekstil). Sedangkan berdasarkan ukuran perusahaan, tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar 10,48 untuk perusahaan besar dan 7,08 untuk perusahaan berskala menengah, serta 2,40 untuk perusahaan kecil. Rerata tersebut merupakan hasil uji analisis varians terhadap variabel ukuran, yang terdapat dalam lampiran.

#### 4.4. Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji nilai *liliefors* dan Shapiro- Wilk, maka data sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Hal tersebut didasarkan pada parameter-parameter sebagai berikut :

##### 1. Rasio Skewness

Rasio Skewness/ S.E. Skewness untuk tipe *high profile* adalah sebesar  $-0,145/0,369 = -0,392$  , sedangkan untuk tipe *low profile* adalah sebesar  $-0,472/0,427 = -1,105$ . Sesuai dengan teori yang ada, jika nilai rasio berada dalam kisaran  $-2$  dan  $+2$ , maka data berdistribusi normal. Karena rasio skewness pada kedua tipe industri tersebut masih berada dalam kisaran tersebut, maka berdasarkan rasio skewness, data berdistribusi normal.

## 2. Rasio Kurtosis

Berdasarkan uji statistik deskriptif, rasio kurtosis untuk tipe industri *high profile* adalah sebesar  $-0,787/0,724 = -1,087$ . Sedangkan untuk tipe industri *low profile* adalah sebesar  $-0,398/0,833 = -0,477$ . Rasio tersebut masih berada dalam kisaran antara  $-2$  dan  $+2$ , maka data dapat digolongkan berdistribusi normal.

## 3. Nilai Signifikansi Uji Kolmogorov –Smirnov

Nilai ini identik dengan nilai *Liliefors*. Untuk tipe *high profile* sebesar  $0,200$  atau  $> 0,05$ , sehingga dianggap berdistribusi normal. Sedangkan untuk tipe *low profile*, meskipun nilai signifikansinya sebesar  $0,021$  atau  $< 0,05$ , namun dengan mempertimbangkan nilai signifikansi hasil uji Shapiro –Wilk yang  $> 0,05$ , diagram box plots, uji normal Q-Q plots, dan rasio skewness dan rasio kurtosis, maka data dapat dikatakan mendekati distribusi normal, dan tetap dapat diolah dengan menggunakan statistik parametrik.

## 4. Nilai Signifikansi Uji Shapiro- Wilk

Nilai signifikansi untuk kedua tipe industri  $> 0,05$  yaitu sebesar  $0,330$  untuk tipe *high profile* dan  $0,073$  untuk tipe *low profile*. Distribusi data sampel berdistribusi normal.

## 5. Normal Q-Q Plots

Sebaran data pada kedua tipe industri baik *high profile* maupun *low profile* berada disekitar garis Q-Q plots. Hanya ada 1 data yang bersifat *outlier* pada tipe industri *low profile* dari sekitar 30 data tipe



*low profile*. Sehingga dengan demikian data yang digunakan berdistribusi normal.

#### 6. Normal Box Plots.

Median pada kedua tipe industri terletak persis ditengah masing-masing box plot. Untuk tipe *high profile* pada angka 13, dan untuk tipe *low profile* pada angka 4. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran data berdistribusi normal.

### 4.5. Uji Hipotesis

#### Hipotesa 1.

Berdasarkan uji beda T-test, didapatkan hasil nilai  $t$  hitung sebesar , sedangkan  $t$  tabel sebesar  $-233,09$  , sehingga  $t$  hitung  $> t$  tabel. Nilai probabilitas yang dimiliki sebesar  $0,000$  yang berarti  $<$  taraf signifikansi  $0,05$ . Sesuai dengan kriteria penerimaan hipotesa dimana  $t$  hitung  $> t$  tabel dan probabilitas  $0,05$ , maka hipotesa yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak dalam industri yang bertipe *high profile* akan lebih ekstensif dalam melakukan praktek *social disclosure* dibandingkan dengan perusahaan yang bertipe *low profile* diterima.

#### Hipotesa 2.

Berdasarkan hasil analisa menggunakan uji beda One way- Anova, didapatkan hasil bahwa pada perusahaan besar, praktek *social disclosure* yang diterapkan lebih ekstensif dibandingkan dengan perusahaan menengah, ditunjukkan oleh mean yang berbeda yaitu  $10,48$  untuk besar dan  $7,08$  untuk menengah. Namun perbedaan tersebut tidak signifikan. Hal

ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang terdapat dalam tabel *multiple comparisons* berdasarkan nilai Tukey HSD dan Bonferroni, dimana kriteria penerimaan hipotesa adalah probabilitas  $< 0,05$ . Untuk perusahaan besar terhadap perusahaan menengah, probabilitasnya adalah 0,061 (Tukey HSD). Sedangkan perusahaan menengah, lebih ekstensif dalam menerapkan praktek *social disclosure* dibandingkan dengan perusahaan kecil., namun demikian perbedaannya tidak signifikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,335 (Tukey HSD) dan 0,479 (Bonferroni). Kemudian antara perusahaan besar dengan kecil, terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang hanya sebesar 0,006 atau  $< 0,05$  pada kedua macam nilai tersebut.

### Hipotesa 3

Berdasarkan uji Anova, yang mencoba menguji perbedaan interaksi antara variabel ukuran dan variabel sektor industri, didapatkan hasil probabilitas sebesar 0,00 atau  $< 0,05$  untuk corrected model, intercept dan variabel sektor, dan 0,733 serta 0,154 untuk interaksi antara sektor dengan ukuran. Dari angka tersebut, terlihat bahwa perbedaan praktek *social disclosure* lebih ditentukan oleh variabel sektor. Sesuai dengan kriteria penerimaan hipotesa dimana jika probabilitas  $< 0,05$  hipotesa alternatif diterima, maka hipotesa yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak dalam tipe industri *high profile* dan bersektor industri primer akan sama ekstensifnya dengan perusahaan yang bergerak dalam tipe industri *high profile* dan bersektor industri sekunder dalam melakukan praktek *social disclosure* dapat diterima.

#### Hipotesa 4

Berdasarkan tabel *multiple comparisons* dalam uji Anova, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Antara sektor primer terhadap sektor sekunder :

Nilai Tukey HSD memiliki nilai probabilitas sebesar 0,339. Sedangkan berdasarkan nilai Bonferroni probabilitas yang dimiliki sebesar 0,485. Karena keduanya memiliki nilai probabilitas  $> 0,05$ , maka antara sektor primer terhadap sektor sekunder tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam menerapkan praktek *social disclosure*.

2. Antara sektor sekunder terhadap sektor tersier :

Nilai probabilitas yang didapat adalah sebesar 0,000. atau  $< 0,05$ . Maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara sektor sekunder dan tersier dalam menerapkan praktek *social disclosure*.

3. Antara sektor primer terhadap sektor tersier :

Nilai probabilitas yang ada adalah sebesar 0,000 atau  $< 0,05$ . Maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara sektor primer dan tersier dalam menerapkan praktek *social disclosure*.

#### 4.6. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tingkat keluasaan praktek *social disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia masih rendah, tidak mencapai 75% dari item yang seharusnya diungkap berdasarkan instrumen pengukur Ernst & Ernst, 1978, sebanyak 27 item.

Hal ini ditunjukkan oleh rerata yang terdapat pada tabel statistik deskriptif berdasarkan tipe industri yang hanya sebesar 13,2195 untuk tipe *high profile* dan 4,2333 untuk tipe *low profile* serta 10,4815 untuk perusahaan besar dan 7,0833 untuk perusahaan menengah dan 3,60 untuk perusahaan kecil. Sedangkan untuk sektor industri primer sebesar 14,222 kemudian untuk sekunder sebesar 12,8710 dan untuk sektor tersier sebesar 4,5806. Hal tersebut diduga berkaitan erat dengan ketiadaan standar yang diperlukan untuk menjadikan praktek *social disclosure* sebagai suatu *mandatory disclosure*. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Beets dan Serther, 1999, dimana standar yang diberlakukan terhadap praktek *corporate social reporting*, menjadikan *social disclosure* sebagai suatu *mandatory disclosure*, sehingga *corporate social reporting* menjadi lebih akurat dan komplit.

Selain itu, rendahnya tingkat *social disclosure* yang dilakukan perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai rerata pada masing-masing pengujian, menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia masih lebih banyak memperhatikan kepentingan *shareholdersnya* dibandingkan dengan kepentingan *stakeholdersnya*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996), Adams *et.al.* (1997), dan Muslim (1998) dimana perusahaan yang bertipe industri *high profile* lebih banyak melakukan praktek *social disclosure* dibandingkan dengan perusahaan yang bertipe industri *low profile*. Konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga dijumpai pada variabel sektor industri,

dimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jones (1999) terbukti bahwa antara perusahaan yang bergerak dalam sektor primer dan tersier terdapat perbedaan yang nyata dalam mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungannya, yang dapat dalam bentuk praktek *social disclosure*. Demikian pula halnya dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor industri sekunder dan tersier. Hal tersebut salah satunya diduga ditentukan oleh adanya Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mewajibkan bagi industri-industri tertentu khususnya yang berada di sektor industri primer dan sekunder untuk mengungkapkan kinerjanya yang beraspek sosial dan lingkungan, misalnya pada industri pertambangan, perminyakan, kehutanan, peternakan dan pertanian serta kimia. Sedangkan pada industri tersier, tidak ada PSAK di Indonesia tidak mewajibkan pelaporan tersebut, jadi pengungkapan kinerja perusahaan yang beraspek sosial dan lingkungan hanya bersifat pengungkapan sukarela saja. Pengungkapan tersebut hanya dilakukan bila perusahaan merasa perlu untuk melakukannya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari Beets (1999), dimana praktek *social disclosure* haruslah menjadi praktek yang bersifat *mandatory disclosure* agar dapat diperbandingkan.

Kemudian untuk variabel ukuran perusahaan, dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa antara perusahaan berskala besar dengan menengah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam menerapkan praktek *social disclosure*. Namun untuk perusahaan besar dan kecil terdapat perbedaan praktek *social disclosure* yang nyata, ditunjukkan oleh probabilitas sebesar 0,006. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Hackton & Milne (1996) dan Andrews *et.al.* (1989). Hal tersebut diduga disebabkan oleh banyaknya perusahaan besar yang bertipe *low profile*. Disamping itu, diduga juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran manajemen perusahaan – perusahaan tersebut terhadap perlunya mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungannya. Namun demikian hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Christopher *et.al.* (1997) yang melakukan penelitian di Australia. Pada industri pertambangan dan perminyakan, variabel ukuran perusahaan dapat menentukan keluasan praktek *social disclosure*, mengingat tingkat sensitivitasnya yang tinggi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Namun pada industri yang lain, perbedaan ukuran perusahaan tidak akan menimbulkan perbedaan praktek *social disclosure*. Dengan demikian perbedaan yang signifikan pada variabel ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari variabel sektor industri.

Rendahnya tingkat *social disclosure* di Indonesia yang ditemukan dalam penelitian ini, juga konsisten dengan hasil penelitian dari Muslim (1998), dimana tingkat praktek *social disclosure* yang ada pada saat itu adalah 24% dari seluruh item yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan. Namun demikian tidak seperti penelitian Muslim terdahulu yang mendasarkan diri hanya pada variabel tipe industri, pada penelitian ini tingkat keluasan praktek *social disclosure* yang didapatkan juga berdasarkan pada variabel ukuran perusahaan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

#### 4.7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengabaikan faktor basis perusahaan, apakah perusahaan tersebut berupa PMDN atau PMA. Bagaimanapun basis perusahaan mempunyai pengaruh terhadap perbedaan tingkat keluasan praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan. Disamping itu, penelitian ini juga mengabaikan faktor budaya perusahaan yang juga mungkin berpengaruh terhadap perbedaan tingkat keluasan praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Jones (1999), didapatkan hasil bahwa antara perusahaan Amerika, China, dan Eropa terdapat perbedaan tingkat pertanggungjawaban sosialnya. Diduga hal tersebut juga berpengaruh terhadap keluasan praktek *social disclosure* perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengabaikan faktor *stakeholder power* (Christopher *et.al.*, 1997) yang seharusnya diuji pula, mengingat dalam perusahaan bersektor industri sekunder stakeholders yang ada di dalamnya sangat kompleks, memerlukan pengujian apakah kekuatan *stakeholders* turut menentukan persamaan keluasan praktek *social disclosure*-nya dengan perusahaan bersektor industri primer.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan di Indonesia relatif masih rendah. Terdapat perbedaan tingkat *disclosure* yang cukup signifikan antara perusahaan yang bertipe *high profile* dan *low profile*. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang merasa dirinya banyak bersentuhan dengan kepentingan *stakeholdersnya*, yaitu perusahaan yang bertipe *high profile*, merasa perlu untuk melegitimasi aktivitasnya. Demikian pula dengan perusahaan yang bersektor industri primer dan sekunder dalam melakukan praktek *social disclosure* lebih luas dibandingkan dengan perusahaan bersektor industri tersier. Hal tersebut dimungkinkan disebabkan oleh adanya kewajiban bagi kedua sektor industri tersebut untuk mengungkapkan kinerjanya yang beraspek sosial dan lingkungan, dan tingginya persentuhannya dengan terjadinya kerusakan lingkungan dan kompleksnya *stakeholders* yang dimiliki. Sedangkan antara perusahaan besar dan menengah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam menerapkan praktek *social disclosure*. Namun berbeda halnya dengan perusahaan kecil dan besar, diantara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan dalam menerapkan praktek *social disclosure*, yaitu pada keluasannya.



## 5.2. Saran

1. Kepada peneliti lain yang memiliki minat dalam bidang akuntansi pertanggungjawaban sosial, terutama *social disclosure*, disarankan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menguji perbedaan praktek *social disclosure* didasarkan pada variabel lain selain variabel ukuran perusahaan dan tipe industri, misalnya didasarkan pada tipe budaya perusahaan. Berdasarkan penelitian Marc T. Jones (1999), didapatkan hasil bahwa tingkat pertanggungjawaban sosial perusahaan Amerika lebih rendah dibandingkan perusahaan Eropa.
  - b. Menguji hubungan kelompok dan kompleksitas *stakeholders* dengan perbedaan praktek *social disclosure*. Kelompok *stakeholders* mana yang paling mempengaruhi praktek *social disclosure* yang diterapkan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Christopher *et.al.*, (1997), didapatkan hasil bahwa praktek *social disclosure* tidak dapat terlepas dari *stakeholder power*.
  - c. Mencari instrumen penguji yang lebih baik daripada instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu Ernst & Ernst, 1978.
2. Sedangkan kepada pihak yang berkepentingan dengan pembuatan standar, disarankan untuk menciptakan standar *social disclosure* yang dibuat terpisah dari Standar Akuntansi Keuangan, guna menjadikan praktek *social disclosure* di Indonesia menjadi suatu *mandatory disclosure*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeppel, Green, J., & K. Bruno, (1993), "Go to Greenwash; The Reality behind Corporate Environmentalism", Fairfax, V.A: Third World Network & APEX Press.
- Aragon Correa, J.A. (1999), "Strategic Proactivity and Firm Approach to the Natural Environment", *Academy of Management Journal*, Vol. 41, pp.556-567.
- Beets, S. Douglas & Christopher C. Serther, (1999), "Corporate Environment Reports; The Need for Standard and An Environmental Assurance Service", *Accounting Horizons*, Vol. 13, No. 2, pp. 31-67.
- Belkaoui, A and Karpik, P.G. (1989). "Development of the Corporate Decision to Disclose Social Information". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 7, No. 4, pp. 36-51.
- Carol, Ann Tilt, (1994), "The Influence of External Pressure Groups on Corporate Social Disclosure; Some Empirical Evidence", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 7, No. 4, pp. 47-72.
- Christopher, Theo, Y.B. Sigit Hutomo, and Gary Monroe, (1997), "Voluntary Environmental Disclosure by Australian Listed Mineral Mining Companies; An Application of Stakeholder Theory", *The International Journal of Accounting and Business Society*, Vol. 5, No. 1, pp. 42-61.
- Deegon, C and Gordon, B. (1994). "An Analysis of the Incentives of Australian Firm to Provide Enviromental Information within their Annual Account". Paper Presented at the Accounting Research Group Seminar Series, Edith Cowan University, Perth, Western Australia.
- Gray, Rob, Reza Kouhy and Simon Lavers, (1995), "Methodological Themes; Constructing a Research Database of Social and Environmental Reporting by UK Companies", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, pp. 78-101.
- Gray, Rob, Reza Kouhy and Simon Lavers, (1995), "Corporate Social and Environmental Reporting; A Review of the Literature and a Longintudinal Study of UK Disclosure", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, pp. 47-77.
- Hackston, David and Markus J. Milne. (1996). "Some Determinant of Social and Enviromental Disclourse in New Zeeland Companies". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 9, No. 1, pp. 77-108.

- Woodward, David G., (1997), "A Can of Worms- Some Problems With The Development and Application of the Concept of Corporate Social Reporting", *The International Journal of Accounting and Business Society*, Vol. 5, No. 1, pp. 1-41.
- Henriques, I. & Sadorsky, P. (1996), "The Determinants of an Environmentally Responsive Firm; An empirical Approach", *Journal of Environmental Economics & Management*, Vol. 30, pp. 381-395.
- Henriques, I. & Sadorsky, P. (1999), "The Determinants of an Environmentally Responsive Firm", *Academy of Management Journal*, Vol. 42, pp. 87-99.
- Jones, Marc T., (1999), "The Institutional Determinants of Social Responsibility", *Journal of Business Ethics*, Vol. 20, pp. 163-179.
- Lindblom, C.K., (1994), "The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social Performance and Disclosure". *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 2 No. 4, pp. 97 – 107.
- Mendenhall, William & R. Beaver, (1992), "A Course in Business Statistic", 3<sup>rd</sup> Ed., PW 5 Kent Publishing Company, Boston.
- Muhammad Muslim Utomo, (1998), "Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia; Studi Perbandingan antara Perusahaan-Perusahaan *High Profile* dan *Low Profile*", makalah *Symposium Nasional Akuntansi III*, September 2000, Jakarta.
- Porter, M. (1980). "Competitive Strategy". Free Press, NY.
- Saul, J. (1996). "The Unconscious Civilization". Penguin, NY.
- Shrivastava, Paul, (1995). "Ecocentric Management for a Risk Society". *Academy of Management Review*, Vol. 23. No. 1. pp. 118-137.
- Singgih Santoso, (2002). "SPSS Vars 10 : Mengolah Data Statistik Secara Profesional". Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Standwick, Peter A, and Sarah D. Stanwick, (1998). "The Relationship Between Corporate Social Performance, and Organizational Size, Financial Performance, and Environmental Performance; An empirical Examination", *Journal of Business Ethics*, Vol. 17, pp. 195-204.
- Sugiyono, (2000). "Statistika untuk Penelitian". Alfabeta, Bandung.
- Weber, Robert Philip. (1992). "Basic Content in Michael S. Lewis-Beck (Ed), Research Practise, International Handbook of Quantitative Applications in the Social Sciences, Vol. 6, London : Sage.

Zadek, Simon, (1998), " Balancing Performance, Ethics and Accountability",  
*Journal of Business Ethics*, Vol. 17, pp. 1421-1441.

Publikasi Lain :

1. Capital Market Directory 2001. PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ)
2. JSX Statistic 4<sup>th</sup> Quarter 2001. PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ).
3. JSX Fact Book 2001. PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ)